

## Diplomasi Indonesia Di Tengah Persaingan Amerika Serikat dan Cina

Hilda Yunita Wono<sup>1</sup>, M. Masad Masrur<sup>1</sup>, Kirana Ratu Sekar Kedaton<sup>1</sup>, Muh. Rifqy Hasbullah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Ciputra, Universitas Sahid  
CitraLand CBD Boulevard, Kec. Sambikareo, Kota Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: [hilda.yunita@ciputra.ac.id](mailto:hilda.yunita@ciputra.ac.id)<sup>1</sup>, [masadmasrur@gmail.com](mailto:masadmasrur@gmail.com)<sup>2</sup>, [kratusekar@student.ciputra.ac.id](mailto:kratusekar@student.ciputra.ac.id)<sup>3</sup>,  
[mrifqy01@student.ciputra.ac.id](mailto:mrifqy01@student.ciputra.ac.id)<sup>4</sup>

Received: June 2022; Accepted: October 2022; Published: December 2022

### Abstract

*There are concerns that make attention in reclamation construction in the South China Sea. Apart from that, the divisions in the field of trade, competition in the context of geopolitics and technology that occurred in the two countries, the United States (US) and China, were considered to be the triggers for the arrival of a new Cold War. The background to the conflict between the two is a form of open and strategic competition carried out in order to obtain the label of the best country in the 21st century. US-China relations were originally in the form of a cooperative framework which then shifted into a strategic and open battle. China considers that the US prioritizes resilience over all the advantages it already has, but now it has begun to decline. Meanwhile, the US considers that China is increasingly terrorizing security, making noise over the prosperity of its citizens, hindering people's values and the value of egoism. From the point of view of the Indonesian state, the crisis in US-China relations needs to be managed through the concept of dynamic equilibrium in order to safeguard its national interests. The research uses a descriptive exploratory type of research method (Mas' oed, 1994:68), which will examine the impact of competition between the US and China on Indonesia's diplomacy strategy. This paper analyzes the increasing US-China competition and its impact on Indonesia's diplomatic strategy. The US-China tensions were caused by a struggle between the two over the goal of becoming the number one strongest figure in the world. The US, which has long been known as a super power country, feels its position is being threatened by the new emerging power China. Countries in the ASEAN region, including Indonesia, as a middle power country, should improve their diplomatic strategies and consider their position. The countries in the region are trying to balance and "play" under the affairs of a number of great power countries.*

*Keywords: Persaingan AS-China; Laut China Selatan; Keseimbangan Dinamis.*

### Abstrak

Adanya kekhawatiran yang membuat perhatian dalam konstruksi reklamasi pada laut China Selatan. Selain itu perpecahan di bidang perdagangan, persaingan dalam konteks geopolitik serta teknologi yang terjadi pada dua negara, Amerika Serikat (AS) dan China dianggap sebagai pemantik datangnya Perang Dingin baru. Latar belakang konflik keduanya merupakan bentuk persaingan terbuka serta strategis dilakukan demi memperoleh label negara terunggul pada abad 21. Hubungan AS-China yang semula berwujud kerangka kerjasama yang kemudian bergeser menjadi pertarungan yang strategis sekaligus terbuka. China menganggap, AS mengutamakan ketahanan atas segala keunggulan yang telah dimiliki namun kini sudah mulai menurun. Sementara AS menganggap, China semakin menyorot keamanan, membuat kegaduhan atas kemakmuran warga, menghambat nilai kerakyatan dan nilai egoisme. Dalam sudut pandang negara Indonesia, krisis yang terjadi dalam hubungan AS-China perlu dikelola melalui konsep dynamic equilibrium demi mengamankan kepentingan nasionalnya. Penelitian menggunakan metode penelitian jenis deskriptif eksploratif (Mas' oed, 1994:68), yang akan mengkaji dampak persaingan antara AS dan China terhadap strategi diplomasi Indonesia. Tulisan ini menganalisis peningkatan persaingan AS-China dan dampaknya terhadap strategi diplomasi Indonesia. Ketegangan AS-China disebabkan adanya pergulatan diantara keduanya terjadi atas tujuan menjadi sosok terkuat nomor satu di dunia. AS yang dikeahui sejak dahulu sebagai negara super power merasa posisinya terancam oleh new emerging power China. Negara-negara di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai negara middle power, patut memperbaiki strategi diplomasi dan mempertimbangkan posisinya. Negara-negara di kawasan berusaha melakukan balancing serta "bermain" dibawah urusan sejumlah negara great power.

Kata Kunci: Persaingan AS-China; Laut China Selatan; Keseimbangan Dinamis.

doi: <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.2621>

© 2022 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International Licenses (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/index>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

## PENDAHULUAN

Sepak terjang China, khususnya sejak tahun 2013, menuai banyak perhatian dan cenderung mengkhawatirkan. Konstruksi reklamasi yang pada Laut China Selatan misalnya, menjadi awal memburuknya hubungan China dengan beberapa negara termasuk dengan negara-negara ASEAN. Amerika Serikat (AS) juga merasa terganggu dengan aktifitas China di kawasan Laut China Selatan. Bukan hanya akibat aktifitas tersebut, memburuknya hubungan AS-China dapat dilihat dari dinamika persaingan dagang, ekspansi China melalui Belt and Road Initiative (BRI) ke wilayah negara-negara sekutu AS, ketegangan China dengan Taiwan, hingga pandemi Covid-19, juga menjadi faktor yang memengaruhi.

Di Laut China Selatan, yang meliputi perairan dan gugusan pulau Paracels dan Spratly, serta Karang Scarborough dan Sungai Macclesfield, China membangun berbagai fasilitas untuk kepentingan geopolitik dan militer. Aktifitas China seperti pembangunan landasan pesawat dan penempatan sejumlah armada perang di kepulauan tersebut, direspon oleh AS melalui peningkatan patroli Freedom of Navigation (FoN) sejak Oktober 2015. AS menganggap bahwa Laut China Selatan adalah jalur perdagangan internasional. Freedom of Navigation merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah AS saat UNCLOS mendekati penyelesaian pembahasan tahun 1979, bertujuan untuk mencegah “klaim maritim eksklusif” dari negara pesisir yang akan menjadi oposisi AS sebagai kekuatan maritim, dan untuk melestarikan mobilitas global pasukan AS (Cassidy, dkk. 2016). Aktifitas AS di wilayah yang diklaim milik China tersebut, memicu aktifitas militer. China meningkatkan kehadiran pasukan militer dan mengirim persenjataan radar frekuensi tinggi, sistem rudal darat-udara dan jet tempur. Berita terakhir terkait rivalitas militer di wilayah tersebut, adalah munculnya kapal perang AS USS Curtis Wilbur yang pada 19 Mei 2021 mulai mengarungi Laut China Selatan. Beberapa aktivitas kapal perang AS makin menimbulkan kemarahan Pemerintah China. (Sorongan, 2021).

Persaingan AS-China, diperuncing dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump sejak kepemimpinannya awal tahun 2017. Donald Trump yang sejak kampanye pencalonannya sebagai Presiden AS dari Partai Republik, akan mengarahkan perekonomian AS pada proteksionisme. Donald Trump, Sang Presiden menetapkan tarif impor sejumlah hasil produksi dari China sebesar US\$50-US\$60 miliar yang masuk ke AS. Menurut Trump, hal ini adalah salah satu solusi untuk menekan defisit neraca perdagangan di antara kedua belah negara dan memperbaiki perekonomian dalam negeri. Selain memberikan 15% tarif impor bagi baja dan 10% bagi aluminium, AS juga melakukan pembatasan tindakan dan aktivitas investasi terhadap China di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Membalas sikap tersebut, dilakukan sebuah pengubahan tarif yang meningkat drastis hingga sebesar 25% pada produk impor AS oleh Pemerintah China sekaligus membawa masalah ini pada WTO. Meski demikian, Presiden Xi Jinping dalam upaya meredakan ketegangan, menyatakan akan menerapkan sistem ekonomi terbuka, sebab jika perang dagang dua negara ini benar-benar terjadi, tentu akan memicu pelemahan ekonomi dunia (Pujayanti, 2018).

Belt and Road Iniatif (BRI), adalah strategi ekspansi ekonomi China yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran di 152 negara yang terpetakan di seluruh Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin. Berdasarkan data yang diterbitkan Refinitiv, yaitu perusahaan AS-Inggris penyedia data pasar finansial global dan infrastruktur, hingga pertengahan tahun 2020 terdapat sekitar 2.600 proyek terkait BRI dengan biaya US\$3,7 triliun, (Aulia, 2021). Program BRI merambah bahkan ke beberapa sekutu AS di Eropa yang tentu

memperkeruh hubungan AS-China mengingat beberapa negara Eropa yang menjadi sekutu AS. Hal ini pula yang mendorong AS melalui G7, berupaya mengimbangi BRI dengan program Build Back Better World (B3W). Presiden Joe Biden bersama Pemimpin G-7 lainnya melalui inisiatif B3W akan memberi kemitraan infrastruktur yang transparan guna membantu menutup kekurangan dana US\$40 triliun yang dibutuhkan negara-negara berkembang pada tahun 2035. Meski tidak disebut secara implisit, program B3W jelas merupakan program tandingan terhadap BRI. Hubungan AS-China juga makin diperburuk oleh tuduhan AS terhadap tanggungjawab wabah massal Covid-19 yang bermula di Wuhan China pada tahun 2019. Menurut AS, tiga pegawai Institut Virologi Wuhan menderita indikasi yang hampir sama dengan virus corona terhitung pada beberapa bulan sebelum negara tersebut mendeklarasikan atas adanya sebuah penularan. Hal ini dibantah oleh Beijing dan mengklaim bahwa Covid-19 justru berasal dari laboratorium di AS (Utomo, 2021).

Persaingan di Laut China Selatan hingga aksi saling tuding atas penyebaran Covid-19, merupakan puncak persaingan mutakhir yang terjadi beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat yakin bahwa China merusak kemakmuran, mengganggu demokrasi, merupakan ancaman bagi kepentingan keamanan, dan bertolak belakang dengan nilai-nilai egoisme (Dupont, 2020). Presiden Amerika Serikat menganggap bahwa pertarungannya dengan China merupakan bentuk usaha untuk memperbaiki ketidakadilan di bidang teknologi dan perdagangan. Trump juga berupaya untuk memperkuat kedudukan AS sebagai vitalitas global. Sama dengan Trump, bagi Presiden Xi Jinping, persaingan dengan AS merupakan upaya perbaikan bagi ketidakadilan dan sebagai upaya mengembalikan dominasi China di Asia dan dunia (Wangke, 2020).

Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN umumnya, persaingan AS-China, terutama di wilayah Laut China Selatan, menempatkan mereka pada posisi “pelanduk di tengah pertempuran dua gajah” sehingga perlu akal yang cerdas untuk menyiasati eksistensinya. Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunai dan Indonesia, atau negara-negara ASEAN umumnya, harus berjuang keras untuk mendesak China mengakui keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa China tidak mempunyai hak atas Laut China Selatan hanya berdasarkan faktor sejarah. Setidaknya, negara-negara ASEAN harus mendesak China menyepakati Code of Conduct atau tata perilaku di wilayah Laut China Selatan dengan menetralkan wilayah tersebut dari aktifitas apapun, terutama aktifitas militer.

Bagi negara-negara ASEAN, kemampuan untuk mendesak negara AS maupun China sebagai negara super power, untuk menjadikan Laut China Selatan sebagai wilayah yang netral dan aman, membutuhkan kekompakan antar sesama anggota. Ujian bagi kekompakan negara-negara ASEAN ini tidak mudah dilalui mengingat beberapa negara anggota ASEAN masih condong kepentingan pada salah satu negara yang sedang bersaing. Kesulitan membangun kekompakan antar sesama negara ASEAN ini setidaknya dapat dilihat dari kegagalan pertemuan menteri luar negeri ASEAN dalam mengeluarkan komunike akhir (joint communique) di Phnom Penh Kamboja, pada 13 Juli 2012. Kegagalan ini terjadi pertama kali dalam 45 tahun sejarah organisasi itu.

Di sisi lain, bagi China, “keberhasilan” memecah kekompakan negara-negara ASEAN dalam menyikapi Laut China Selatan, mendorong AS untuk makin meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam kegiatan politik, perdagangan hingga militer di kawasan ASEAN khususnya dan secara umum di kawasan Indo-Pasifik. Meski peningkatan aktifitas AS di kawasan ini wajar mengingat pusat aktifitas perdagangan dunia kini mulai bergeser dari wilayah Atlantik ke Indo-Pasifik, bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang terpenting

adalah bagaimana berupaya untuk bandwagoning, balancing, serta “bermain” dibawah kepentingan negara-negara great power.

Peningkatan aktifitas China di kawasan Laut China Selatan, bukan hanya mengganggu hubungan dengan negara-negara di sekitarnya, namun juga mengundang keterlibatan AS yang segera merubah kawasan ini menjadi area persaingan terbuka. Hal ini menempatkan Indonesia, dan umumnya negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan wilayah yang klaim China tersebut, harus memperkuat strategi diplomasi dan kerjasamanya.

Indonesia merupakan wilayah strategis yang menjadi arena persaingan AS dengan China. Upaya AS merebut pengaruh Indonesia, dilakukan dengan meningkatkan kerjasama ekonomi, diplomasi, militer, serta keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan AS fokus kepada hubungan geopolitik, membantu Indonesia memerangi terorisme, kebebasan dasar manusia, memromosikan demokrasi, serta menggapai visi misi investasi dan perdagangan AS (Vaughn, 2011). China sebagai negara yang berupaya menghegemoni kawasan Pasifik, juga berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Bagi China, kepentingan tersebut dimanfaatkan dalam tiga aspek, yaitu melalui peningkatan hubungan perniagaan dan pengembangan infrastruktur, keamanan dan militer, serta hubungan dua negara. China melalui ambisi proyek BRI memberikan investasi proyek infrastruktur yang diwujudkan melalui berbagai program kepada Indonesia.

Bagi Indonesia, diplomasi yang mampu menjaga keseimbangan kawasan, sangat diperlukan agar kepentingan nasionalnya dapat terjamin. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan dua negara great power tersebut? Artikel ini akan membahas peningkatan persaingan AS-China yang berdampak pada strategi diplomasi Indonesia.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Pertarungan sektor Pasifik sangat khas oleh adanya aktivitas saling serang antara negara yang memiliki kedudukan dan kekuatan yang sama-sama kuat. Menurut Odgaard (2007), hanya ditemukan dua sumber yang memenuhi kriteria penguasa kekuatan kawasan Pasifik, yaitu China dengan ekonominya dan AS dari kemampuannya di bidang militer. Bangkitnya China dan usaha untuk menyamakan ulang kedudukan dengan AS di wilayah Pasifik berpengaruh kepada negara-negara lain. Namun, sejumlah negara yang tergolong middle power, yaitu negara di wilayah Asia Tenggara, patut menjadi sorotan dan dipertimbangkan posisinya. Goh (2008) menyampaikan bahwa anomali di kawasan Pasifik, dimulai oleh para ahli dengan pertanyaan mengenai cara antara negara di Asia Tenggara berhubungan yang dicurigai sedang berusaha untuk bandwagoning, balancing, serta “bermain” dibawah kuasa negara great power. Bagi negara-negara Asia Tenggara, keberadaannya di kawasan yang sangat kompetitif ini, justru memberikan peluang dalam peningkatan status internasionalnya. Ada kecenderungan negara-negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan persaingan yang terus berlangsung.

Menurut Gill, Goh, & Huang (2016), sudut pandang mengenai strategi pengelolaan kawasan dipengaruhi oleh dua prinsip dasar, yaitu ketidakpastian dan diversifikasi. Prinsip ketidakpastian menyebutkan, bahwa negara-negara low power hingga middle power akan mengaktualisasikan seluruh perjalanan hidup bernegaranya pada negara yang berkekuatan lebih besar. Negara di Asia Tenggara dalam prinsip ini memiliki kepekaan tinggi terhadap pada peran konsekuensial AS bagi kawasan regional sebagai bentuk estimasi yang mungkin dilakukan China. Sementara itu, prinsip diversifikasi yang dialami oleh Negara Asia Tenggara diartikan sebagai bentuk tidak dapat dihindarinya gejolak oleh perlakuan negara super power dalam

usahanya untuk membenuk keberagaman strategi dan implikasi yang terjadi di bidang ekonomi dengan tetap berhubungan baik dengan negara berkekuatan besar tersebut.

Sebagai negara besar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan untuk memanfaatkan persaingan AS-China. Perdagangan global di jalur maritim Indonesia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, oleh Indonesia dilihat sebagai peluang bagi tumpuan maritim global untuk mendapatkan berbagai barang dari dua negara adidaya dan meningkatkan akses ke pasar utama (Hamilton-Hart & McRae, 2015). China sebagai *new emerging power* dan Amerika Serikat sebagai *super power* yang telah mengikutsertakan Indonesia dalam strategi politiknya untuk meraih cita-cita negaranya.

Kepentingan nasional adalah hal fundamental pada literatur studi hubungan internasional. H. J. Morgenthau (1948) tepatnya pada karya berjudul *Politics Among Nations* sebagaimana dikutip Hadiwinata (2017), menyakini bahwa kekuasaan sebagai derivasi dari kepentingan, merupakan penentu arah hubungan antarnegara. Sebuah kepentingan nasional menjadi otak dikeluarkannya kebijakan suatu negara. Secara normatif, kepentingan nasional adalah tujuan yang diinginkan dan dapat dicapai oleh negara dengan melakukan jalinan hubungan bersama dengan negara lain (Codevilla & Seabury, 2006). Sementara Nuechterlein (1976) mengungkapkan bahwa garis besar kepentingan nasional, sebagaimana pendapat para ahli, dibagi menjadi empat dimensi fundamental, yaitu dimensi ideologis, pertahanan, ekonomi, dan tata dunia.

Aplikasi kata persaingan pada AS dan China juga menghasilkan pengertian yang problematis. Persaingan melahirkan kompetisi di satu sisi dan dapat menghasilkan kerjasama di sisi lainnya. Kunci utama sebuah strategi dalam persaingan antarnegara adalah dengan memerhatikan keterbatasan sumberdaya, memilih jenis kemampuan yang dapat dikembangkan, dan memaksimalkan pengaruh internasional (Goldstein & Pevehouse, 2014).

Di tengah persaingan dua negara besar tersebut, Indonesia memilih strategi kerjasama dan tetap melibatkan mereka demi kepentingan nasionalnya. Selain itu juga memanfaatkan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam membuka ruang demokrasi yang lebih jujur dan adil seperti proses pemilihan umum (Pemilu) yang mulai dilakukan perubahan dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Komisi pemilihan umum (KPU) sudah mulai menyusun regulasi serta pengembangan aplikasi agar proses Pemilu dengan pemanfaatan teknologi digital dapat segera diterapkan sehingga harapannya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat lebih meningkat.

Strategi kerjasama yang dikembangkan Indonesia, dilaksanakan melalui peninjauan situasi yang dapat dimanfaatkan melalui konsep *dynamic equilibrium* (keseimbangan dinamis). Perspektif *dynamic equilibrium* adalah standpoint yang memvisualisasikan strategi dimana sebanding dengan kerjasama bilateral yang berprinsip untuk tidak memihak, yang mana menyebabkan tidak adanya konsep otoritas dalam hubungan itu (Poling, 2013). Konsep *dynamic equilibrium* dimanfaatkan untuk menjaga keamanan kepentingan nasional Indonesia, yaitu dengan bekerjasama bersama kedua negara *great power* di wilayah Pasifik.

Gagasan konsep *dynamic equilibrium* dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan diterapkan sejak tahun 2011 (Poling, 2013). Konsep yang juga disebut Doktrin Natalegawa tersebut, lahir dari pilar politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki negara Indonesia, dimana diartikan tidak adanya kecenderungan untuk memilih salah satu negara (netral). *Dynamic equilibrium* merupakan manifestasi politik luar negeri bebas-aktif yang dimonitori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar lebih aktif berkomunikasi dan menjajaki wilayah Asia Timur dan Tenggara. Gambaran penjabaran politik luar negeri saat ini

adalah “navigating a turbulent ocean” dan bukan “navigating a turbulent ocean”. Dimana arti dari konsep itu yang pertama adalah menjaga kesetimbangan atas otonomi pengambilan keputusan, kebebasan dalam berkelakuan dan pendekatan konstruktif, kedua, enggan bekerjasama dengan aliansi militer, ketiga, berkomunikasi dengan dunia luar, dan keempat, bersikap nasionalis yang mencerminkan identitas Indonesia.

Proses demokrasi sangat bergantung pada komunikasi politik. Transformasi juga terjadi dalam komunikasi politik, salah satu komponen kunci dari proses demokrasi. Efek dari praktik percakapan politik yang mencakup komunikasi yang dimediasi oleh dunia maya dan diskusi yang berlangsung di ruang nyata telah dibawa oleh Internet sebagai media baru. Di Internet, persaingan telah menggantikan protes jalanan yang sangat besar, ePoll menangani pemungutan suara langsung, dan partisipasi adalah cara bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Politik dulunya dikomunikasikan melalui orasi atau pidato yang ditujukan untuk para pemimpin masa depan, namun saat ini juga dilakukan secara publik dan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, Internet, Cyberspace (Kampanye Cyber) (Hia & Siahaan, 2021).

Selain merefleksikan intepretasi politik luar negeri bebas-aktif, dalam konteks ASEAN, konsep Dynamic equilibrium juga ditujukan untuk meletakkan politik luar negeri Indonesia pada sektor yang berbentuk damai, stabil dan mampu membantu pada konstruksi perniagaan, baik regional maupun nasional (Rizki & Agussalim, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian jenis deskriptif eksploratif (Mas’oed, 1994:68), yang akan mengkaji dampak persaingan antara AS dan China terhadap strategi diplomasi Indonesia. Penjelasan fenomena antara AS dan China tersebut melibatkan penggambaran fenomena yang rinci dengan dalih pengujian hipotesis tertentu dengan menggunakan variabel serta gejala yang telah terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mana mengombinasikan informasi serta data dari berbagai macam materi berupa dokumen, buku, kisah, serta transkrip yang tersedia dalam bentuk cetak maupun online yang mana dipergunakan agar mampu mendukung keberlangsungan penelitian. Untuk memvalidasi informasi tersebut dengan mengumpulkan data yang merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh penulis setelah menentukan metode pengumpulan data adalah menentukan teknik pengumpulan data yang akan dipakai. “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”(Sugiyono,2005:62). Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Pengujian teori terdahulu dan variabel terbaru yang ditemukan menjadi pondasi dalam memperkuat orientasi penelitian mengenai fenomena dampak persaingan antara AS dan China terhadap strategi diplomasi Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Para pemimpin China semakin sensitif atas melemahnya demokrasi AS dan yakin atas kekuasaan diktatorial yang mengutamakan tatanan sosial dan keseimbangan politik. Sikap kritis ini muncul terutama akibat krisis keuangan pada 2008-2009. Keadaan itu makin memperparah hubungan AS-China ketika mereka saling berprasangka atas pemaksaan konsep yang tidak dicita-citakan atau dibagikan melalui jalur internasional. Donald Trump, Presiden AS memberikan penegasan ulang pada China sebab anggapan mencampuri internal AS, mencoba mengirim pola otoritas ke AS, dan berperang politik. Aksi saling kecam ini bergeser dari kerjasama ke persaingan strategis, sehingga memicu perdebatan intens tentang kemungkinan Perang Dingin baru.

Menurut Dupont (2020), persaingan AS-China ini mirip dengan Perang Dingin dengan beberapa penjelasan yaitu: pertama, persaingan terjadi diantara dua negara adidaya dunia sebagai pendukung paham demokrasi liberal maupun komunisme. Kedua, adalah sektor yang meliputi keseluruhan sistem yuridiksi. Elemen ketiga, berkaitan dengan nilai dan energi. Keempat, merupakan persaingan menuju kekuasaan global sehingga akan berlangsung lama. Sementara itu, elemen kelima berhubungan dengan geopolitik. Dan elemen terakhir yaitu tidak adanya kelompok yang berpihak penuh atas konfrontasi militer. Perbedaan dengan Perang Dingin yang pernah terjadi hanyalah, China telah menggantikan Uni Soviet sebagai ancaman utama bagi AS.

Sebagian besar persaingan antara Uni Soviet dan AS, berada pada wilayah militer serta politik, sedangkan dengan China kini, merupakan pertarungan di bidang perniagaan dimana meliputi investasi, teknologi, perdagangan, dan industri strategis. Product Domestic Bruto (PDB) Uni Soviet saat itu senilai 40% dari PDB AS, sementara PDB China 65% lebih tinggi dan tumbuh lebih cepat dari PDB AS. Persaingan AS-China tentu akan berpengaruh secara global karena kedua negara menyumbang sekitar 40% dari PDB global. Konflik ini kemungkinan akan terus bergulir dengan diiringinya penalti ekonomi meskipun China mengelak untuk tidak terprovokasi oleh tindakan AS. China menganggap, ketegangannya dengan AS bersifat situasional (Wangke, 2020).

Saat ini, sentra perniagaan global telah berpindah dari Atlantik menuju Pasifik yang memvisualisasikan penurunan Eropa dan kenaikan Asia. Ketegangan hubungan AS-China berlangsung di kawasan Indo-Pasifik sehingga mempunyai pengaruh gravitasi geografis yang kuat dengan negara-negara regional. AS maupun China adalah negara kuat di wilayah Pasifik dimana kepentingan mereka sering bertabrakan dan ada beberapa pemicu yang berpotensi mendorong terjadinya konfrontasi militer seperti Taiwan dan Hong Kong, Korea Utara, Laut China Timur dan Selatan. Ketegangan hubungan AS-China dapat memperburuk situasi internasional dan berubah menjadi perang terbuka. Kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka persaingan kekuasaan besar akan berlangsung lama dan dapat menghilangkan profit yang telah diperoleh sejak liberalisasi perdagangan selama 70 tahun, merusak rantai pasokan global (global supply chains), serta kekuatan sistem politik dunia akan terbagi menjadi dua dengan posisi yang tidak saling cocok.

Di tahun 2017 tercatat bahwa tingkat keterbantuan PDB AS pada ekonomi dunia senilai 24,03%, sementara China terdeteksi sebesar 15,2%. Keikutsertaan perniagaan AS dan China terhadap PDB dunia sangat besar dimana mencapai 8,8% dan 12,8%. Indonesia memerlukan kerjasama dengan kedua negara (Wangke, 2020). Pada periode 2015-2019, AS merupakan tujuan kedua ekspor non-migas terbesar setelah China bagi Indonesia, dengan jumlah total US\$ 83,48 miliar. Dari segi investasi, periode 2010-2019, AS merealisasikan investasi langsung sebesar US\$ 13,65 miliar dengan jumlah Foreign Direct

Investment (FDI) atau urutan kelima sebagai negara terbesar di Indonesia. Bersama AS, sejak November 2010, Indonesia telah melegitimasi Comprehensive Partnership Agreement (Gill, Goh, & Huang, 2016). Perubahan perkembangan hubungan dari Hubungan Kemitraan Komprehensif menjadi Hubungan Kemitraan Strategis dilakukan atas tujuannya membentuk struktur prioritas, target, dan hubungan agar tercipta sistem hubungan yang terstruktur dan terprediksi (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Indonesia berpartisipasi dalam United Nations Peacekeeping Operations (UNPKOs) untuk bidang militer dan keamanan melalui Global Peace Operations Initiative (GPOI). Hal ini didukung oleh AS dengan menyediakan pelatihan militer perdamaian, bantuan bencana dan kemanusiaan, serta peningkatan kapasitas militer Indonesia (Murphy, 2010).

Sementara kerjasama dengan China, di tahun 2015-2019, China adalah negara pertama di konteks ekspor Indonesia sejumlah total US\$ 99,99 miliar dan US\$ 185,26 miliar pada aktivitas impor. Pada tahun 2013, melalui Kemitraan Strategis Komprehensif, Indonesia melakukan kerjasama yang meliputi peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan militer (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Kerjasama bidang militer dan pertahanan sempat tidak berjalan akibat aktifitas China di Laut China Selatan. Pada 2016, tercatat bahwa ada penolakan dari Angkatan Laut Indonesia untuk bekerjasama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) terkait latihan bersama dengan negara anggota ASEAN di Laut China Selatan (Goh, Gill, & Huang, 2016).

Intinya, AS maupun China merupakan negara tujuan ekspor utama RI. Pangsa pasar ekspor Indonesia ke China dan AS pada Januari-Maret 2021 masing-masing sebesar 21,36% dan 11,86%. Pada periode tersebut, nilai ekspor Indonesia ke China melonjak 62,98%, sedangkan ke AS naik 15,94% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (Judith, 2021). Demikian pula, pada saat pandemi Covid-19, kerjasama di bidang pemenuhan kebutuhan vaksin, ikut menentukan prinsip kerjasama antarnegara. Diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia berhasil mendapatkan sejumlah komitmen penyediaan vaksin dari tiga instansi pemroduksi vaksin dari China yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Indonesia juga mendapatkan vaksin Pfizer dan Moderna dari AS.

Bagi Indonesia, kerjasama dan kolaborasi dengan kedua negara tersebut adalah pilihan terbaik untuk menjaga kepentingan nasional, alih-alih persaingan dan kompetisi zero-sum games. Dalam eskalasi persaingan di Laut China Selatan, Indonesia dalam konsepsi dynamic equilibrium, memastikan keteraturan kawasan, termasuk menjaga kesatuan ASEAN dalam mendapatkan tempat utama di kawasan. Konsep dynamic equilibrium dijalankan dengan aturan organisasional extended ASEAN dengan fokus utama mewadahi kawasan yang sedang bekerjasama demi mewujudkan instansi keamanan formal yang disebut Indo-Pacific Community (Rizki & Agussalim, 2016). Dynamic equilibrium ditujukan bagi keselarasan dalam kerjasama antarnegara yang saling bekerja dengan damai sehingga tercipta simbiosis mutualisme tanpa indikasi adanya dominasi tunggal kekuasaan di kawasan tersebut.

Terkait sengketa di Laut China Selatan, Indonesia bersama anggota ASEAN lain, menyepakati dokumen deklarasi tata perilaku (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea/DoC) di Laut China Selatan yang disepakati antara ASEAN dan China di tahun 2012. Meskipun Code of Conduct (CoC) sebagai jabaran lebih rinci dari DoC terkait tata berperilaku di Laut China Selatan sulit dan belum disepakati, namun upaya CoC jelas sangat penting dalam mengelola isu Laut China Selatan. Beijing mengklaim Laut China



Selatan sebagai wilayahnya dan bertumpang tindih dengan keempat negara di wilayah Asia Tenggara, yakni Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia. Kesediaan ASEAN mendorong dialog dalam mengelola perbedaan klaim di Laut China Selatan, menunjukkan negara-negara Asia Tenggara pada prinsipnya menginginkan perairan tersebut damai (Kompas, 9 Juni 2021).

Negara-negara ASEAN juga menyadari hal yang sama, dimana kerjasama perlu lebih dikedepankan demi kepentingan nasional masing-masing pada saat persaingan AS-China masih terus berlangsung. Meode negara-negara dalam caranya berhubungan di kawasan Asia Tenggara dikembangkan bagi balancing serta “bermain” dibawah kepentingan negara-negara great power (Goh, 2008). Oleh karena itu, negara-negara ASEAN pun, berusaha memanfaatkan persaingan yang terus berlangsung. Beberapa negara ASEAN juga akan mengaktualisasikan secara penuh kepentingan mereka terhadap aktor yang lebih kuat melalui kerjasama dengan AS maupun China. Meskipun demikian, persoalan terbesar negara-negara ASEAN adalah “kekurangkompakan” dalam menghadapi dua kekuatan besar dengan “bahasa yang sama”, sehingga sengketa perbatasan di Laut China Selatan oleh China lebih disukai jika dilakukan secara bilateral dengan masing-masing negara sengketa bukan melalui kesepakatan ASEAN-China. Ini pula yang menjadi salah satu penghambat terwujudnya CoC sebagai turunan dari DoC dalam tata perilaku di Laut China Selatan. Hingga kini, negara-negara ASEAN dan China belum selesai melakukan perundingan untuk CoC.

Tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan atas masalah Laut China Selatan, dan lebih luas lagi terkait dengan persaingan antara AS-China, Indonesia tetap melaksanakan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Asumsi yang mendasari kelahiran konsep dynamic equilibrium merupakan bentuk kekhawatiran atas tingkat agresivitas China di Laut China Selatan. Jika melihat perubahan pada konflik AS dan China di kawasan Pasifik, penggunaan konsep tersebut terbukti relevan.

Konsep dynamic equilibrium atau Doktrin Natalegawa, mencakup pertama, tidak diperbolehkannya adanya negara dominan di kawasan. Kedua, mengutamakan sikap tidak memihak (netral). Ketiga, berperan sebagai penyeimbang atau mediator pemutus pergerakan konflik. Keempat, mempertahankan stabilitas dan pembangunan kawasan dengan menggandeng kuat para pemilik kekuatan besar global. Kelima, merepresentasikan jalur diplomasi yang damai dengan konsep dialogis. Keenam, menciptakan solidaritas dengan fokus utama menjaga keseimbangan dinamisme di kawasan regional. Ketujuh, menumbuhkan rasa saling percaya antarnegara berkonflik. Kedelapan, meningkatkan kerjasama antar negara. Kesembilan, mencari solusi menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Kesepuluh, menyelesaikan konflik dengan kode etik (Kurniaawan, 2011). Hingga saat ini, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, jika mengajukan sesuatu kepada negara lain, Indonesia lebih mudah diterima karena mereka tahu Indonesia tidak “menyerang”. Indonesia selalu berusaha menjadi jembatan dan menjadi bagian dari solusi. Indonesia memiliki rekam jejak diplomasi yang baik, yang tidak bisa dibuat dalam satu hari (Kompas, 12 Agustus 2020).

## **KESIMPULAN**

Ketegangan AS-China disebabkan adanya pergulatan diantara keduanya terjadi atas tujuan menjadi sosok terkuat nomor satu di dunia. AS yang dikeahui sejak dahulu sebagai negara super power merasa posisinya terancam oleh new emerging power China. Mengingat peran ekonomi

dan politik kedua negara yang sangat besar, ketegangan itu sangat mengganggu negara-negara lain di dunia, terutama di wilayah yang menjadi titik sentral ketegangan yaitu wilayah Pasifik terutama di Laut China Selatan.

Negara-negara di wilayah ASEAN, termasuk Indonesia, sebagai negara middle power, patut memperbaiki strategi diplomasi dan mempertimbangkan posisinya. Negara-negara di kawasan berusaha melakukan balancing serta “bermain” dibawah urusan sejumlah negara great power. Kondisi sekitar yang kompetitif menyajikan peluang bagi negara-negara tersebut untuk meningkatkan status internasional. Ada kecenderungan negara-negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan persaingan yang terus berlangsung.

Indonesia melalui konsep dynamic equilibrium berusaha “bermain” between the two reefs dan melakukan navigating a turbulent ocean. Bersama AS, Indonesia tetap melakukan kerjasama di bidang pembangunan dan perniagaan, diplomasi, militer, dan keamanan. Sementara dengan China, Indonesia juga tetap mendapat manfaat dalam tiga aspek fundamental, yaitu melalui hubungan perniagaan dan konstruksi infrastruktur, keamanan dan militer, serta hubungan diplomatis. Jika melihat perkembangan konflik AS dan China di kawasan Pasifik didukung kemampuan diplomasi yang fleksibel, penggunaan konsep dynamic equilibrium akan terbukti relevan dilakukan demi menjaga kepentingan nasionalnya.

Saran dan Rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu Dengan prinsip politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, hendaknya politik Luar Negeri Indonesia menunjukkan arah dan implementasi hubungan luar negeri yang berorientasi memberi manfaat ekonomi, perdagangan, perdamaian, kesejahteraan, keamanan, kemerdekaan, kebebasan menentukan politik yang menghormati kedaulatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dalam menuntukan kebijakan dalam maupun luar negeri Indonesia. Dengan politik yang bebas aktif Indonesia sebaiknya dapat memainkan peran dan posisi Indonesia yang tidak masuk dalam pusaran blok atau pengaruh dari kekuatan negara super power yang saling bersaing untuk merebutkan pengaruh/hegemoni khususnya di Kawasan Asia Pasific dalam hal ini antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adirini Pujayanti, Adirini., (2018). Perang Dagang Amerika Serikat – China dan Implikasinya Bagi Indonesia, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* Vol. X, No. 07/I/Puslit/April/2018.
- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477>
- Aulia, Luki., (2021) Negara-negara G-7 Tandingi Proyek Infrastruktur China, *Harian Kompas*, 13 Juni 2021.
- BBCNews Indonesia (2012), ASEAN gagal sepakati pernyataan akhir, *BBCNews Indonesia*, diunduh pada 2 Agustus 2021, tersedia di [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120713\\_aseanfail](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/07/120713_aseanfail)
- Cassidy, Fikry., Samosir, Partogi J.P., Oktarossa, Debbi., Prasetyo, Erry Wahyu., Nugroho, Faiz Ahmad., Fitri, Widya., dan Putro, Robertus Aji., (2016). *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pada Organisasi Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri.
- Codevilla, A., & Seabury, P. (2006). *War: Ends and Means*. New York: Potomac Books.
- Dupont, Alan. (2020). The US-China Cold War Has Already Started, *The Diplomat*, 6 Juli 2020.
- Gill, B., Goh, E., & Huang, C.-H. (2016). *The Dynamics of US-China-Southeast Asia Relations*.

- Sydney: The United States Studies Center at the University of Sydney.
- Goh, E. (2008). Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing Regional Security Strategies. *International Security*, 32(3), 113–157.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamilton-Hart, N., & McRae, D. (2015). Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence. *United States Studies Centre at the University of Sydney*, (November), 1–35.
- Harkan, Ar-Ali., & Eriyanto. (2021). “Predicting the Results of the 2019 Indonesian Presidential Election with Google Trend Analysis of Accuracy, Precision, and Its Opportunity.” 558(Aprish 2019):1–9.
- Judith, Paschalia (2021). RI Ambil Peluang di Tengah Tensi Perseteruan AS-China, *Harian Kompas* 17 April 2021.
- Kompas (2021), ASEAN, China, dan Laut China Selatan, *Tajuk Rencana Harian Kompas*, 9 Juni 2021.
- Kompas (2021), Diplomasi Aktif Indonesia, *Tajuk Rencana Harian Kompas*, 12 Agustus 2021.
- Kurniawan, Yudha. (2011), *Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan*, Paper ini dipresentasikan pada *Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II*, Bandung, 2011.
- Lubis, I. A. R., Ramdan, A. T. M., & Wiryany, D. (2022). Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 6(1), 193–206. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3064>
- Mas'oeed, Mohtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES
- Murphy, A. M. (2010). US Rapprochement with Indonesia: From Problem State to Partner. *Contemporary Southeast Asia*, 32(3), 362. <https://doi.org/10.1355/cs32-3c>
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246–266. <https://doi.org/10.1017/S0260210500116729>
- Poling, G. B. (2013). *Dynamic Equilibrium: Indonesia's Blueprint for a 21st Century Asia Pacific*. Tersedia di <https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia%E2%80%99s-blueprint-21st-century-asia-pacific>
- Odgaard, L. (2007). *The Balance of Power in Asia-Pacific Security: US-China Policies on Regional Order*. London and New York: Routledge.
- Putra, R., & Annissa, J. (2019). Visualisasi Makna Politik Pada E-Comic Melalui Akun @Kostumkomik. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 3(2), 49-61. Retrieved from <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/article/view/1109>
- Rizki, Rahmat Miftahul. & Agussalim, Rahmat Miftahul. (2016) *Konsepsi Dynamic Equilibrium Sebagai Antikulasi Politik Luar Negeri Indonesia di Asia Pasifik*, Yogyakarta: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Sorongon, Tommy., (2021), China Murka! Kapal Perang AS Berlayar di Laut China Selatan, *CNBC Indonesia* 21 May 2021 21:12. Tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210521201139-4-247503/china-murka-kapal-perang-as-berlayar-di-laut-china-selatan>
- Triwicaksono, Yohanes, and Adi Nugroho. 2021. “Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah”. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI* 5 (1), 133-45. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i1.2037>.
- U.S. Department of State. (2020). *U.S. Relations with Indonesia*. Tersedia di <https://www.state.gov/u-s-relations-with-indonesia/>
- Utomo, Ardi Priyatno (2021). AS Desak WHO Transparan soal Investigasi Asal-usul Covid-19 *Kompas.com* - 26/05/2021, 11:33 WIB, tersedia di

<https://www.kompas.com/global/read/2021/05/26/113316070/as-desak-who-transparan-soal-investigasi-asal-usul-covid-19>

- Vaughn, B. (2011). Indonesia: Domestic politics, Strategic Dynamics, and American Interests. *Asian Economic and Political Issues*, 1–38.
- Wangke, Humphrey. 2020. Ketegangan Hubungan As-China dan Dampaknya Terhadap Indonesia, *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020.